

## **REPRESENTASI HATORI KBS DALAM AKUNTABILITAS DANA DESA DI KECAMATAN BUKIT SANTUAI**

**Oleh:**

**Setianingsih, Subhan Ilham Thareq**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Palangka Raya

Email Korespondensi : [setianingsih.stn@gmail.com](mailto:setianingsih.stn@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Fenomena digitalisasi pemerintahan desa menuntut mekanisme akuntabilitas publik yang lebih terbuka dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi aplikasi *HATORI KBS* (Hasil Monitoring Dokumen Desa) dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dokumen digital, dan triangulasi sumber. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan hasil wawancara berdasarkan tiga dimensi akuntabilitas menurut Behn (2001), yaitu akuntabilitas keuangan (*accountability for finances*), akuntabilitas atas keadilan prosedural (*accountability for fairness*), dan akuntabilitas atas hasil kinerja (*accountability for performance*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *HATORI KBS* memperkuat transparansi pelaporan, mempercepat proses audit, dan menumbuhkan kedisiplinan administratif aparatur desa. Namun demikian, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur digital masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaannya. Secara teoritis, penelitian ini memperluas penerapan teori akuntabilitas ke dalam konteks digitalisasi pemerintahan desa, sedangkan secara praktis memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat integrasi sistem digital dan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan partisipatif.

**Kata Kunci :** Hatori KBS, akuntabilitas, Dana Desa, digitalisasi, pemerintahan desa

### **Abstract**

*The phenomenon of digitalization in village governance demands a more transparent and efficient mechanism of public accountability. This study aims to analyze the representation of the HATORI KBS (Village Document Monitoring Results) application in strengthening the accountability of Village Fund management in Bukit Santuai District, East Kotawaringin Regency. This research employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, digital document observation, and source triangulation. The analysis was conducted by categorizing interview results based on Behn's (2001) three dimensions of accountability: accountability for finances, accountability for fairness, and accountability for performance. The findings reveal that HATORI KBS enhances reporting transparency, accelerates audit processes, and fosters administrative discipline among village officials. Nevertheless, limitations in human resource capacity and digital infrastructure remain major challenges in its implementation. Theoretically, this study extends the application of accountability theory within the context of village government digitalization, while practically providing policy recommendations for local governments to strengthen system integration and enhance the capacity of village officials in realizing transparent and participatory governance.*

**Keywords:** HATORI KBS, accountability, Village Fund, digitalization, village governance

**A. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor pemerintahan, termasuk hingga ke tingkat desa. Transformasi ini bukan sekadar tren administratif, melainkan kebutuhan mendesak dalam mendukung prinsip good governance yang menekankan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas layanan publik (World Bank, 2021).

Dalam konteks pemerintahan desa, prinsip ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Regulasi ini diperkuat oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.

Peningkatan alokasi Dana Desa setiap tahun menuntut tata kelola yang semakin transparan. Pada tahun 2024, pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun bagi lebih dari 74.000 desa di Indonesia (Indonesia.go.id, 2024). Besarnya dana tersebut menuntut sistem pengawasan dan pelaporan yang terdigitalisasi agar setiap transaksi publik dapat diaudit secara real-time dan terbebas dari penyimpangan.

Akuntabilitas di sini tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif, melainkan juga hubungan sosial antara pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai penerima manfaat (Thareq & Apriani,

2024). Dalam konteks ini, digitalisasi hadir bukan hanya untuk memfasilitasi pelaporan, tetapi mempercepat keterbukaan informasi, memperkuat kepercayaan publik, serta memperluas partisipasi warga desa.

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa kini semakin mengedepankan aspek digitalisasi sebagai elemen kunci dalam mendukung tata kelola yang baik. Penelitian Rahmawati et al., (2023) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara signifikan meningkatkan akuntabilitas, sementara kompetensi aparatur saja tidak cukup optimal tanpa dukungan sistem digitalisasi yang memadai.

Selaras dengan itu, Khusna & Adiwijaya (2024) menyatakan bahwa meskipun akuntabilitas alokasi Dana Desa berdampak positif pada kinerja keuangan desa, moderasi digitalisasi memperkuat hubungan ini secara substansial.

Namun, digitalisasi di tingkat desa tidak selalu berjalan mulus. Sejumlah penelitian menunjukkan masih adanya hambatan dalam adopsi teknologi seperti keterbatasan literasi digital aparatur, infrastruktur internet yang belum merata, dan ketidaksiapan kelembagaan desa (Saragih et al., 2024; Syachbrani, 2024). Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung integrasi sistem digital dalam pengelolaan Dana

Desa. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi empiris terhadap efektivitas kebijakan digitalisasi agar dapat memperkuat regulasi dan pelaksanaan di tingkat desa.

Beberapa studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital mampu mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi data, dan memperluas jangkauan layanan publik (Wardana et al., 2025). Sejumlah inovasi telah diterapkan di berbagai daerah, seperti SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa), SID (Sistem Informasi Desa), dan DIGIDES (Digitalisasi Desa) yang secara signifikan mendukung akuntabilitas vertikal dan horizontal dalam pengelolaan keuangan desa apabila diimplementasikan secara optimal (Adinda Putri Zakiyatus Solihah et al., 2025; Nulloh et al., 2025; Saragih et al., 2024).

Aplikasi SIPPD (Perencanaan dan Penganggaran Desa) juga berperan penting dalam meningkatkan akurasi pencatatan, kecepatan pelaporan, dan partisipasi masyarakat (Syachbrani, 2024). Namun, sebagaimana inovasi digital, implementasi aplikasi tersebut menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan SDM dalam penguasaan teknologi, infrastruktur jaringan internet yang belum merata, serta pengawasan yang belum maksimal (Saragih et al., 2024; Syachbrani, 2024).

Namun demikian, belum banyak kajian yang menelaah sistem digital desa yang berfokus pada aspek monitoring dokumen sebagai instrumen akuntabilitas substantif. Di sinilah aplikasi HATORI KBS (Hasil Monitoring Dokumen Desa)

menempati posisi strategis, karena dirancang bukan hanya untuk input data keuangan, tetapi juga untuk memastikan kelengkapan, keterlacakkan, dan keadilan prosedural dalam pengelolaan Dana Desa.

Untuk menilai sejauh mana sistem ini berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban publik, penelitian ini menggunakan kerangka teori akuntabilitas Robert D. Behn (2001) yang menyoroti tiga dimensi utama: akuntabilitas keuangan (*accountability for finances*), akuntabilitas keadilan prosedural (*accountability for fairness*), dan akuntabilitas terhadap hasil (*accountability for performance*). Ketiga dimensi ini digunakan untuk menganalisis bagaimana HATORI KBS merepresentasikan akuntabilitas dalam praktik tata kelola Dana Desa. Kajian ini juga mengacu pada konsep akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2006) yang menekankan pentingnya transparansi, keterbukaan informasi, dan evaluasi publik sebagai pilar utama pemerintahan yang baik.

Kedua kerangka ini dipilih karena mampu menjelaskan akuntabilitas publik tidak hanya dari sisi keuangan, tetapi juga dari aspek prosedural dan kinerja, sehingga relevan untuk menganalisis bagaimana sistem digital seperti HATORI KBS membentuk relasi baru antara pemerintah desa dan warga dalam konteks tata kelola modern.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan literatur terkait bagaimana sistem digital seperti HATORI KBS dapat berperan sebagai instrumen pertanggungjawaban administratif dan substantif di tingkat desa. Temuan diharapkan memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kebijakan digitalisasi desa yang lebih efektif, serta memperkuat praktik good governance melalui akuntabilitas yang berbasis teknologi.

HATORI KBS merupakan inovasi yang dikembangkan sebagai sistem digital untuk monitoring kelengkapan dokumen desa. Sistem ini diterapkan secara aktif di Kecamatan Bukit Santuai yang terdiri dari 14 desa. Namun demikian, hingga saat ini belum ada studi yang secara spesifik mengkaji HATORI KBS dalam konteks akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, terutama bagaimana sistem ini berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban di tingkat desa.

Akuntabilitas dalam konteks ini tidak sekadar berkaitan dengan kewajiban melaporkan penggunaan sumber daya publik, tetapi juga meliputi nilai-nilai integritas, keterbukaan akses informasi, dan keberadaan mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan program serta pencapaian hasilnya (Saputra et al., 2021).

Secara normatif, akuntabilitas Dana Desa telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengamanatkan lima tahapan penting: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan menuntut bukti dokumentatif yang

valid dan terdigitalisasi agar dapat diaudit secara real-time oleh berbagai pemangku kepentingan (Husain et al., 2023).

Menurut Fajrin et al., (2022), kualitas akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sangat dipengaruhi oleh sistem pelaporan yang digunakan. Semakin sistematis dan terdigitalisasi sistem yang digunakan, semakin tinggi peluang bagi akuntabilitas untuk terwujud, karena transparansi dan keterlacakkan data menjadi lebih kuat.

Robert D. Behn (2001) dalam bukunya menyatakan akuntabilitas tidak hanya sebatas kewajiban administratif untuk melaporkan tindakan, tetapi mencakup tiga bentuk utama: akuntabilitas keuangan (*accountability for finances*), akuntabilitas atas keadilan prosedural (*accountability for fairness*), dan akuntabilitas terhadap hasil kinerja (*accountability for performance*). Ketiga bentuk akuntabilitas ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan Dana Desa di tingkat lokal.

Behn menekankan bahwa organisasi sektor publik harus mampu menjelaskan tidak hanya bagaimana mereka membelanjakan uang, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut berdampak dan seberapa adil proses yang dijalankan (Behn, 2001).

Akuntabilitas Keuangan (*Accountability for Finance*) merujuk pada sejauh mana kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa secara transparan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam hal ini HATORI KBS memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk memonitor kelengkapan dan verifikasi dokumen keuangan, sehingga meminimalisir potensi manipulasi anggaran, penyalahgunaan dana, dan pelaporan fiktif. Dengan tersedianya dokumen digital yang terdokumentasi secara sistematis, pengawasan oleh pihak kecamatan menjadi lebih efisien dan berbasis bukti.

Akuntabilitas atas Keadilan Prosedural (*Accountability for Fairness*) menekankan pada prinsip kesetaraan akses terhadap informasi dan keadilan dalam proses pelaksanaan anggaran. Dalam implementasi HATORI KBS seluruh desa diwajibkan mematuhi prosedur dan standar yang sama dalam mengunggah dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan. Hal ini menciptakan kesetaraan prosedural antar desa serta mencegah praktik diskriminatif atau ketimpangan informasi yang dapat terjadi dalam proses *non-digital*. Aplikasi ini turut menjamin bahwa proses penilaian dilakukan berdasarkan sistem bukan subjektivitas.

Akuntabilitas terhadap Hasil Kinerja (*Accountability for Performance*) berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah desa dalam menunjukkan hasil atau dampak nyata dari penggunaan Dana Desa, bukan sekadar kepatuhan

administratif. Dengan HATORI KBS, tidak hanya dokumen input yang tercatat, tetapi juga pencapaian target, serta evaluasi capaian program. Ini memungkinkan adanya penilaian berbasis kinerja terhadap sejauh mana Dana Desa digunakan secara efektif untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

Sementara itu, menurut Mardiasmo (2006), akuntabilitas publik didefinisikan sebagai kewajiban lembaga pemerintah, termasuk pemerintah desa, untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik, transparan, dan terbuka kepada masyarakat maupun lembaga pengawas.

Mardiasmo menekankan bahwa akuntabilitas tidak dapat terwujud tanpa sistem pelaporan yang terdokumentasi dengan baik, serta adanya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintahan (Mardiasmo, 2006).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis representasi aplikasi HATORI KBS dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bukit Santuai. Pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimana sistem digital HATORI KBS merepresentasikan tiga dimensi akuntabilitas keuangan,

prosedural, dan kinerja sebagaimana dirumuskan oleh Behn (2001), dalam praktik pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bukit Santuai.

Dengan pendekatan teoritis dari **Behn (2001)** dan **Mardiasmo (2006)**, kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan instrumen digital yang mendukung praktik *good governance* di tingkat desa.

### **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam proses dan representasi aplikasi HATORI KBS dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bukit Santuai. Metode deskriptif dipilih karena bertujuan untuk menginterpretasikan fenomena berdasarkan kondisi yang nyata apa adanya tanpa manipulasi variabel (Creswell, 2014).

Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, karena penelitian ini memfokuskan analisis pada satu wilayah administratif yang menjadi lokus penerapan sistem digital, yaitu Kecamatan Bukit Santuai. Studi kasus memungkinkan eksplorasi secara intensif dan kontekstual terhadap interaksi antara teknologi, aktor, dan kebijakan lokal (Yin, 2018).

Kecamatan Bukit Santuai dipilih secara purposif karena merupakan wilayah pertama di Kabupaten Kotawaringin Timur yang menerapkan aplikasi HATORI KBS di seluruh 14 desa. Kondisi ini menjadikan Bukit Santuai representatif untuk menilai sejauh mana sistem digital desa berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas

dalam konteks pemerintahan yang beragam kapasitas SDM dan infrastruktur.

Informan ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, mencakup kepala desa, operator HATORI KBS, dan pejabat kecamatan bagian pemerintahan desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan Dana Desa. Sebanyak tujuh informan diwawancara, terdiri atas tiga kepala desa, dua operator HATORI KBS, dan dua pejabat kecamatan bagian pemerintahan desa. Seluruhnya dipilih karena terlibat langsung dalam proses pengelolaan dan pengawasan Dana Desa melalui sistem digital tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dokumen digital, dan telaah kebijakan terkait implementasi sistem digital di tingkat desa.

Analisis dilakukan dengan model Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dimulai dengan pengelompokan hasil wawancara berdasarkan tema-tema yang muncul sesuai tiga dimensi akuntabilitas Behn (2001), kemudian dilanjutkan dengan penelusuran pola hubungan antar kategori untuk menghasilkan interpretasi substantif. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, serta proses *member checking* dengan memberikan ringkasan hasil temuan kepada informan guna memastikan

kesesuaian informasi dengan pengalaman aktual mereka.

Pendekatan kualitatif ini dipandang relevan untuk memahami tidak hanya sejauh mana sistem digital bekerja secara administratif, tetapi juga bagaimana ia memengaruhi perubahan perilaku birokrasi dan pola relasi akuntabilitas antara pemerintah desa dan masyarakat.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil penelitian mengenai penerapan aplikasi HATORI KBS (Hasil Monitoring Dokumen Desa) di Kecamatan Bukit Santuai menunjukkan bahwa sistem digital ini berperan signifikan dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Analisis dilakukan dengan memadukan teori akuntabilitas menurut Behn (2001) dan Mardiasmo (2006), serta dibandingkan dengan temuan penelitian terdahulu, untuk melihat sejauh mana HATORI KBS mampu menjawab tantangan akuntabilitas di tingkat desa.

Robert D. Behn (2001) menegaskan bahwa akuntabilitas publik tidak hanya terbatas pada kewajiban administratif, tetapi terdiri dari tiga dimensi yang saling berkaitan: akuntabilitas keuangan, akuntabilitas atas keadilan prosedural, dan akuntabilitas terhadap kinerja. Pada dimensi keuangan, penelitian ini menemukan bahwa HATORI KBS berfungsi sebagai instrumen kontrol yang efektif. Dokumen keuangan yang sebelumnya rentan hilang, tercecer, atau dimanipulasi, kini dapat terdokumentasi secara sistematis dan terdigitalisasi.

Dengan adanya sistem ini, pengawasan oleh aparat kecamatan dapat dilakukan lebih cepat dan berbasis bukti. Temuan ini sejalan dengan penelitian Husain et al. (2023) yang menekankan bahwa sistem pelaporan digital mempermudah proses audit dan meningkatkan transparansi. Dengan demikian, dimensi keuangan dalam akuntabilitas publik yang ditekankan Behn terbukti terimplementasi melalui inovasi ini.

Pada dimensi keadilan prosedural, HATORI KBS menjamin keseragaman prosedur antar desa. Setiap desa diwajibkan untuk mengunggah dokumen yang sama dalam format standar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Hal ini menciptakan keadilan prosedural karena tidak ada perbedaan perlakuan antar desa, serta mengurangi ruang terjadinya diskriminasi administrasi yang sering muncul dalam sistem manual.

Penelitian ini memperkuat argumen Behn (2001) bahwa akuntabilitas harus mencakup aspek *fairness*, di mana prosedur yang adil menjadi syarat bagi terciptanya *good governance*. Lebih jauh, hasil ini selaras dengan temuan Khusna & Adiwijaya (2024) yang menunjukkan bahwa digitalisasi memperkuat integritas administrasi, terutama dalam pengelolaan Dana Desa.

Pada dimensi kinerja, penelitian ini menemukan

bahwa HATORI KBS tidak hanya merekam input administratif, tetapi juga membantu dalam mengevaluasi pencapaian program desa. Melalui sistem ini, capaian target pembangunan dapat ditelusuri, dan pelaporan kinerja menjadi lebih berbasis data. Aparat kecamatan dapat melihat apakah dana yang digelontorkan benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan masyarakat desa.

Dengan demikian, akuntabilitas kinerja sebagaimana digagas Behn (2001) terwujud melalui aplikasi digital ini. Hal ini juga mendukung pandangan Mardiasmo (2006) bahwa akuntabilitas publik harus berorientasi pada hasil, bukan hanya kepatuhan administratif.

Lebih jauh, penelitian ini menemukan adanya relevansi dengan dinamika akuntabilitas yang dijelaskan oleh Thareq & Apriani (2024). Mereka menekankan bahwa praktik akuntabilitas Dana Desa seringkali menghadapi persoalan struktural, seperti ketidakmerataan politik, tumpang tindih kewenangan, dan relasi kuasa antara pemerintah desa dengan *elite* lokal. Fenomena *elite capture* sering kali membuat akuntabilitas hanya bersifat formalitas.

Namun, penerapan HATORI KBS di Kecamatan Bukit Santuai menunjukkan bahwa digitalisasi dapat mempersempit ruang terjadinya penyimpangan tersebut. Dengan adanya dokumen yang terdigitalisasi dan dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan, praktik manipulasi data atau intervensi *elite* menjadi semakin sulit dilakukan.

Temuan ini memperkuat argumen Bovens (2007) bahwa *social accountability* menuntut keterlibatan banyak aktor (*many eyes and many hands*) agar akuntabilitas benar-benar berjalan efektif.

Penelitian ini juga mendapati bahwa kehadiran HATORI KBS meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mekanisme akuntabilitas. Masyarakat desa menjadi lebih mudah mengakses informasi mengenai program pembangunan, karena laporan dapat dipantau secara digital. Temuan ini mendukung pendapat Brinkerhoff & Wetterberg (2016), yang menekankan bahwa akuntabilitas sosial memerlukan partisipasi aktif warga sebagai pengawas jalannya pemerintahan.

Selain ketiga dimensi akuntabilitas menurut Behn (2001), penelitian ini juga menemukan adanya tantangan teknis dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang memengaruhi efektivitas implementasi HATORI KBS di desa. Beberapa aparatur desa masih menghadapi kendala dalam penguasaan teknologi, seperti keterbatasan kemampuan mengoperasikan aplikasi, jaringan internet yang tidak stabil, serta minimnya fasilitas pendukung.

Dari sisi keterbukaan informasi publik, HATORI KBS berkontribusi dalam memperluas akses masyarakat terhadap data pengelolaan Dana

Desa. Transparansi ini memperkuat fungsi kontrol sosial, karena masyarakat dapat melihat secara langsung perkembangan program pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan konsep *social accountability* yang dikemukakan Brinkerhoff & Wetterberg (2016), di mana keterlibatan masyarakat merupakan faktor kunci untuk memastikan akuntabilitas berjalan tidak hanya secara vertikal (pemerintah kepada negara), tetapi juga secara horizontal (pemerintah kepada warga).

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun HATORI KBS mempersempit peluang penyimpangan, namun peran pengawasan eksternal dari kecamatan, inspektorat, maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tetap diperlukan. Sistem digital tidak serta-merta menghapus potensi moral hazard, sehingga pengawasan harus tetap dilaksanakan secara simultan. Hal ini memperkuat argumentasi Mardiasmo (2006) bahwa akuntabilitas publik harus dipertanggungjawabkan tidak hanya melalui media laporan, tetapi juga melalui mekanisme evaluasi dan pengawasan yang berkesinambungan.

Selain itu, terdapat pula dampak terhadap budaya birokrasi di desa. Sebelum adanya HATORI KBS, proses administrasi lebih banyak bersifat manual, lambat, dan seringkali tidak terdokumentasi dengan baik. Setelah penerapan aplikasi ini, aparatur desa dituntut untuk bekerja lebih profesional, disiplin dalam pelaporan, serta konsisten dalam mengikuti prosedur standar.

Transformasi ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan sekadar instrumen teknis, tetapi juga sarana reformasi birokrasi di tingkat desa. Sejalan dengan penelitian Wardana et al. (2025), digitalisasi administrasi desa terbukti mampu mendorong efisiensi, efektivitas, dan perubahan budaya kerja aparatur pemerintahan, di mana HATORI KBS mendorong efektivitas kinerja pemerintahan desa sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa.

Akhirnya, penelitian ini juga memperlihatkan adanya dampak jangka panjang berupa peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan adanya sistem dokumentasi digital yang lebih terbuka, masyarakat merasa bahwa Dana Desa dikelola secara lebih transparan dan akuntabel. Kepercayaan publik ini penting karena menjadi modal sosial bagi keberhasilan pembangunan desa. Temuan ini memperkuat pendapat Putnam (1993) bahwa kepercayaan sosial merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari keseluruhan temuan, penelitian ini memperlihatkan bahwa aplikasi HATORI KBS mampu menjawab tiga dimensi akuntabilitas Behn (2001) dan prinsip akuntabilitas Mardiasmo (2006), sekaligus menutup celah permasalahan akuntabilitas sebagaimana diidentifikasi Thareq & Apriani (2024).

Representasi HATORI KBS dalam akuntabilitas Dana Desa di Kecamatan Bukit Santuai bukan sekadar bentuk digitalisasi administrasi, tetapi merupakan upaya substantif dalam memperkuat tata kelola desa yang lebih transparan, adil, partisipatif, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan HATORI KBS di Kecamatan Bukit Santuai tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga memiliki dampak substantif dalam memperkuat keadilan prosedural, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang berfokus pada sistem keuangan desa seperti SISKEUDES atau SID, penelitian ini menyoroti HATORI KBS sebagai sistem pemantauan dokumen yang merepresentasikan bentuk akuntabilitas substyaantif sebuah aspek yang belum banyak dikaji dalam literatur administrasi publik Indonesia.

Meskipun hasil penelitian ini menggambarkan peran HATORI KBS dalam memperkuat tiga dimensi akuntabilitas publik, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada satu kecamatan, yaitu Bukit Santuai, sehingga hasilnya belum sepenuhnya merepresentasikan variasi kondisi desa di wilayah lain yang mungkin memiliki kapasitas SDM dan infrastruktur digital berbeda. Kedua, data yang diperoleh bersifat kualitatif dan sangat bergantung pada persepsi

serta pengalaman informan, sehingga belum dapat mengukur tingkat akuntabilitas secara kuantitatif. Ketiga, dinamika politik lokal, tingkat partisipasi masyarakat, serta dukungan kebijakan daerah belum ditelusuri secara mendalam padahal faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi keberlanjutan implementasi sistem digital desa.

Untuk penelitian mendatang, diperlukan pendekatan *mixed methods* yang mengombinasikan data kualitatif dan kuantitatif guna mengukur pengaruh digitalisasi terhadap tingkat akuntabilitas secara lebih objektif. Selain itu, riset komparatif antara desa yang telah menerapkan HATORI KBS dengan desa yang masih menggunakan sistem manual dapat memberikan pemahaman yang lebih tajam tentang perbedaan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas analisis ke aspek kebijakan dan kelembagaan daerah untuk menilai sejauh mana regulasi dan dukungan pemerintah daerah menentukan keberhasilan sistem digital seperti HATORI KBS dalam mendorong tata kelola yang akuntabel dan partisipatif.

## **D. Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa merupakan kebutuhan yang menjadi tuntutan dari regulasi

dan meningkatnya alokasi Dana Desa setiap tahun. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa secara tegas mengamanatkan pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib administrasi. Dengan nilai anggaran yang terus meningkat hingga mencapai Rp71 triliun pada tahun 2024, kebutuhan akan sistem digital menjadi semakin mendesak agar pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan efisien.

Dalam konteks ini, aplikasi HATORI KBS di Kecamatan Bukit Santuai menunjukkan indikasi dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Pada dimensi akuntabilitas keuangan, HATORI KBS terbukti efektif mendokumentasikan laporan keuangan secara sistematis, meminimalisir manipulasi, dan memperkuat proses audit berbasis bukti.

Dimensi akuntabilitas prosedural, aplikasi ini menciptakan keseragaman standar antar desa sehingga mencegah diskriminasi administratif dan memastikan keadilan prosedural. Sedangkan pada dimensi akuntabilitas kinerja, HATORI KBS mendukung evaluasi capaian pembangunan desa dan memungkinkan penilaian berbasis hasil, bukan sekadar kepatuhan administratif.

Penelitian ini mengungkap sejumlah temuan anomali yang tidak sepenuhnya sesuai dengan asumsi

awal mengenai digitalisasi akuntabilitas desa. Penerapan aplikasi HATORI KBS terbukti mampu mempersempit ruang terjadinya *elite capture*. Selain itu, sistem ini memunculkan transformasi budaya birokrasi desa dengan menuntut aparatur bekerja lebih profesional, disiplin, dan konsisten dalam penyusunan laporan keuangan. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa digitalisasi tidak serta-merta menyelesaikan seluruh permasalahan akuntabilitas, yaitu masih terdapat tantangan berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketidakmerataan infrastruktur internet, serta kebutuhan pengawasan eksternal tetap menjadi tantangan mendasar yang harus diatasi.

Cakupan penelitian yang terbatas pada satu kecamatan menjadi batasan dalam generalisasi hasil. Studi mendatang dapat memperluas lokus ke wilayah lain serta menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur hubungan antara tingkat digitalisasi dan tingkat akuntabilitas secara empiris.

Secara teoritis, penelitian ini memperluas penerapan teori akuntabilitas Behn (2001) ke ranah digitalisasi pemerintahan desa, menunjukkan bahwa teknologi informasi dapat menjadi *enabler* bagi terciptanya akuntabilitas

multi-dimensi. Secara kebijakan, hasil penelitian merekomendasikan perlunya integrasi sistem digital antar desa, penguatan pelatihan teknis berkelanjutan bagi aparatur, dan penataan ulang regulasi agar mendukung pengelolaan Dana Desa yang berbasis data dan partisipasi publik.

HATORI KBS bukan sekadar inovasi administratif, tetapi merupakan instrumen substantif dalam membangun tata kelola desa yang transparan, adil, dan berorientasi hasil.

### **Rekomendasi/Saran**

Pertama, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan agar aparatur desa mampu mengoperasikan aplikasi HATORI KBS secara maksimal. Kedua, pemerintah daerah perlu memperkuat infrastruktur jaringan internet dan sarana pendukung di desa guna memastikan kelancaran implementasi aplikasi. Ketiga, sinergi pengawasan eksternal melalui kecamatan, inspektorat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus tetap diperkuat agar integritas data dan praktik akuntabilitas lebih terjamin.

### **Daftar Pustaka**

Adinda Putri Zakiyatus Solihah, Ruslan Abdul Ghofur, & Citra Etika. (2025). Efektivitas Penerapan SISKEUDES Dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparasi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang BawangBarat). In *YUME : Journal of Management* (Vol. 8, Issue 1).

- Behn, R. D. (2001). *Rethinking democratic accountability*. Brookings Institution Press.
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework 1. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Brinkerhoff, D. W., & Wetterberg, A. (2016). Gauging the effects of social accountability on services, governance, and citizen empowerment. *Public Administration Review*, 76(2), 274–286. <https://doi.org/10.1111/puar.12399>
- Fajrin, F., H., F., & Suwandi, M. (2022). GOOD VILLAGE GOVERNANCE: MENCEGAH FRAUD PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA MELALUI APLIKASI SISKEUDES. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 3(2), 172–186. <https://doi.org/10.24252/isafir.v3i2.30920>
- Husain, S. P., Seber, I. S., & Monoarfa, V. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 66–76. <https://doi.org/10.37905/jar.v4i1.64>
- Indonesia.go.id, *Dana Desa Semakin Besar, Semakin Berdaya*, Tanggal 29 April 2024
- Khusna, L. S., & Adiwijaya, Z. A. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kinerja Keuangan Melalui Digitalisasi. *JFAS : Journal of Finance and Accounting Studies*, 6(3), 165–177. <https://doi.org/10.33752/jfas.v6i3.8680>
- Mardiasmo. (2006). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- Nulloh, S., Mustaqim, Z., Juliansyah, R., Muarif, S., Giawa, M. L., & Prasetyo, E. (2025). INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS APLIKASI DIGITAL DESA (DIGIDES) DI DESA GAGA

- KECAMATAN PAKUHAJI. *Jurnal Humaniora Revolusioner*, 8(6), 56–61. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1175>
- Rahmawati, R., Heriana, T., Diana Sari, M., Dewi, S., & Almas, N. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1), 1533–1542. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12881>
- Rizki Ismail, M., Setiawan Saputra, T., Sari, A. S., & Wulandari, S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Terhadap Efektivitas Administrasi (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan Kota Palembang Bagian Staff Umum dan Kepegawaian). *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 1065–1069. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14709024>
- Saputra, D. N., Sopanah, A., & Hasan, K. (2021). Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Dengkol (Studi Kasus pada Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *NCAF (Proceeding of National Conference on Accounting & Finance)*, 3, 238–252. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art21>
- Saragih, J., Butar-butar, D. F., Barus, B. S., Ginting, M., & Panjaitan, H. (2024). IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 3(2), 87–98. <https://doi.org/10.47652/jpkmhmm.v3i2.587>
- Syachbrani, W. (2024). Peran Teknologi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Bata Ilyas Journal of Accounting*, 5(1). <https://doi.org/10.37531/bijac.v5i1.6802>
- Thareq, S. I., & Apriani, G. (2024). DINAMIKA AKUNTABILITAS DANA DESA DI ERA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 13(2), 198–208.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Wardana, R. I., Putri, N. E., & Umar, G. (2025). Digitalisasi Pelayanan Publik : Solusi Atau Masalah Baru ? *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, 5(2), 7933–7943. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1>
- World Bank. (2021). *World development report 2021: Data for better lives*. Washington, DC: World Bank.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.